BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan berciri nusantara atau biasa disebut negara maritim yang terdiri dari 17.000 pulau lebih. Yang di satukan dengan wilayah perairan dan udara dengan batas-batas hak dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Yang juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mewujudkan wawasan nusantara dan menetapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi yang efektif dan efisien.¹

Melihat kondisi geografis Indonesia tersebut pada beberapa dekade terakhir sektor transportasi sangat berperan besar dalam mengakselerasi gerak langkah pembangunan di dunia. Lajunya pergerakan manusia, barang dan jasa ialah karena peran dari pada transportasi. Dengan tumbuh dan berkembangnya teknologi di bidang transportasi baik transportasi darat, laut maupun udara membuat jarak antar pulau-pulau yang jauh bisa ditempuh dengan waktu yang relatif cepat. maka transportasi laut dan penyebrangan mempunyai peranan yang sangat berpengaruh demi kelancaran arus barang dan manusia.

---

¹ Nur Paikah, “*perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang kapal laut berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran di indonesia*”, jurnal Al-Adalah, Vol 3 No 2, juli 2018 : 117-127

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan penyebrangan harus dapat menangani kebutuhan permintaan terhadap jasa transportasi laut dan penyebrangan agar lebih efektif dan efisien. Konsepsi penyebrangan adalah sebagai penghubung dan alternatif jaringan jalan yang di pisahkan oleh perairan merupakan wujud pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang transportasi.²

Hal di atas khususnya di Provinsi Maluku Utara, Jasa angkutan Laut sering kita temukan di daerah kepulauan yang dimana telah menjadi penghubung alternatif antar pulau, transportasi laut sangat berpotensi di kepulauan nusantara yang dapat dijangkau sampai ke pulau-pulau terluar. Di Maluku Utara juga tergolong sebagai provinsi kepulauan dengan hamparan pulau-pulau yang berjumlah kurang lebih 805 pulau dan mempunyai potensi wisata bahari yang indah. Sehingga transportasi laut tentu perlu dikembangkan sebagai moda satu-satunya sebagai penghubung antar pulau.³

Dalam hal ini kapal sebagai transportasi yang dominan, digunakan masyarakat Maluku Utara untuk melakukan berbagai kegiatan pengangkutan baik barang maupun penumpang. Kapal merupakan sarana yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dalam bidang pariwisata. Salah satu jenis kapal transportasi laut di Maluku Utara yaitu *speedboat* merupakan salah satu moda yang menjadi penghubung antara Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan.

---

² Fredy Numberi, *Transportasi dan Perubahan Iklim*, (jakarta: PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia Group, 2011), hlm., 79.

³ Purwanto antonius, "*provinsi maluku utara*", kompaspedia.kompas.id, di akses tanggal 27 maret 2021

Moda *speedboat* beroperasi pada siang maupun malam hari, pada berbagai cuaca dan mengangkut bukan hanya orang tapi juga barang. Semakin meningkatnya pelaku perjalanan menggunakan moda ini, menjadi keharusan perlunya perhatian terhadap aspek kenyamanan dan keselamatan pengguna moda.⁴

Data Operasional pelabuhan Rum-Bastiong di beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan antara *speedboat* dan Kapal motor. Kapal yang beroperasi di pelabuhan Rum-Bastiong antara lain yaitu *speedboat* dan perahu motor, dimana *speedboat* bisa melayani sekitar sepuluh sampai dua belas orang sedangkan perahu motor mengangkut sekitar 25 orang dan 12 kendaraan roda dua dalam sekali perjalanan.⁵

Proses pengangkutan penumpang menjadi keharusan operator *speedboat* untuk menjamin keamanan dan keselamatan penumpang. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi kecelakaan yang dapat mengakibatkan suatu kerugian dan ketidakpastian baik individu maupun kelompok. Karena kecelakaan menunjukkan pada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja atau tidak diketahui. Dalam proses kecelakaan yang dialami sangat memungkinkan kekhilafan atau kesalahan yang dilakukan operator *speedboat* yang berakibat pada kecelakaan yang dapat merugikan atau sampai merenggut jiwa penumpang.

---

⁴ Abdul gaus,dkk , '' Aplikasi Metode Performance Analysis dalam Analisa Tingkat Pelayanan Mode *Speedboat*'' jurnal Penelitian Vol. 06 No. 01 hlm 37

⁵ Sujarwanto, ''Pengembangan Pelabuhan di Wilayah Gugus Kepulauan'', Jurnal Penelitian Transportasi Laut, vol. 21 No. 10110 hlm. 53

Mengingat pentingnya peran angkutan laut yang mengatur sistem keselamatan penumpang di atur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam hal keselamatan penumpang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang.⁶

Asuransi sosial dalam hal ini Asuransi Jasa Raharja sebagai bentuk perusahaan negara, Perseorangan atau badan usaha mengasuransikan perusahaannya untuk bertindak melindungi dan menjaga keamanan setiap penumpang dan bahaya-bahaya yang menyimpannya. Tujuan dari pada pertanggungjawaban ini adalah untuk melindungi masyarakat, oleh karena itu pertanggungungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964. Tentang Dana Pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang dan Undang-Undang nomor 34 Tahun 1964. tentang Dana pertanggungungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan yang dapat kita sebut sebagai pertanggungungan sosial.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya, negara memberikan jaminan dan perlindungan terhadap warga negaranya yang mengalami kecelakaan penumpang maupun kecelakaan lalu lintas. Dibuktikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana pertanggungungan Wajib kecelakaan Penumpang. Berdasarkan pasal 3 angka 1 Undang-Undang No. 33 tahun 1964 yang berbunyi : Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan

---

⁶Lihat Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan. Penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dibebaskan dari pembayaran iuran wajib. Dan Iuran wajib tersebut digunakan untuk mengganti kerugian berhubung dengan: Kematian Cacat tetap, akibat dari kecelakaan penumpang.

Pasal ini menyatakan bahwa penumpang yang sah yang mengalami kematian dan atau cacat tetap akibat dari kecelakaan penumpang mendapat hak ganti rugi. Berdasarkan pasal 4 angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964.

Selanjutnya pada penetapan peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang kenaikan besaran santunan dan iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang alat angkutan umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/penyebrangan, Laut, dan Udara (PMK Nomor 15/2017) PMK ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017.

Dalam hal ini pemerintah mengamati dalam peningkatan nilai santunan yang dilakukan karena terjadi perubahan pada faktor kebutuhan hidup dan inflasi, antara lain kenaikan biaya rumah sakit, obat-obatan dan penguburan. Selain itu peningkatan nilai santunan perlu untuk penggantian biaya perawatan dan pengobatan dimana masyarakat yang menjadi korban harus mengeluarkan dana

pribadi untuk biaya perawatan dan pengobatan yang nilainya di atas besar nilai santunan yang diberikan.⁷

Melihat hal tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab Negara terhadap warga negaranya, untuk bagaimana meminimalisir kerugian yang dialami oleh korban kecelakaan penumpang angkutan umum. Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 15/2017 terkait kenaikan besaran santunan ini diharapkan manfaat dan perlindungan yang diterima oleh korban lebih memadai. Dilihat pada sebuah kasus pada tanggal 22 juni 2019, kecelakaan tabrakan kapal yang dialami kapal kayu Mila dengan *speedboat* Delta di depan dermaga Bastiong Ternate. Yang berakibat seorang anak berusia 10 Tahun Lutfiana Jabir harus kehilangan lengan kirinya. Awalnya kapal kayu Mila berlayar menuju Ternate sekitar pukul 17.00 WIT, kapal kayu tersebut siap sandar di dermaga Bastiong Ternate, saat bersamaan, *speedboat* Delta dan Kapal Kayu Mila baru saja keluar dari dermaga Bastiong Ternate menuju Tidore.⁸

Dilihat bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja dalam memberikan besaran santunan yang sesuai dengan amanat Undang-Undang No 33 Tahun 1964 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 15/2017) terkait kenaikan besaran santunan korban kecelakaan penumpang umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan. Berdasarkan peristiwa ini, dilihat

---

⁷ Lihat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017

⁸ Cermat, anak 10 tahun Kehilangan lengan saat kecelakaan laut di ternate, <https://kumparan.com/cerita-maluku-utara/2019/06/25>. Diakses pada tanggal 4 april 2020, pukul 11.02 WIT.

bagaimana jaminan dan perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja atas masyarakat yang mengalami kecelakaan penumpang maupun kecelakaan lalulintas jalan. Dibuktikan dengan berlakunya Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana pertanggunganan Wajib kecelakaan Penumpang dan PMK Nomor 15/2017.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum oleh PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan penyebrangan laut antar pulau, dengan judul : **Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan *Speedboat* Penyebrangan Laut Antar Pulau Tidore-Ternate Oleh PT. Jasa Raharja (Persero) (Studi Kasus Korban Kecelakaan Penyebrangan Rum-Bastiong).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Ternate atas korban kecelakaan penyebrangan laut antar pulau di kota Ternate?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan pemberian santunan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Ternate atas korban kecelakaan penyebrangan laut antar pulau di kota Ternate.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan pemberian santunan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademis dan menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Asuransi mengenai hak korban kecelakaan penyebrangan laut antar pulau dan dana asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) yang lebih baik.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis serta dapat mengetahui sejauh mana kewajiban asuransi PT. Jasa Raharja memberikan pertanggung jawaban dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan secara teknik pelaksanaan penyaluran santunan PT. Jasa Raharja kepada korban kecelakaan penyebrangan laut antar pulau. Serta menjadi bahan bacaan dan referensi bagi teman-teman mahasiswa.